



INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrohim
Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Salam Sejahtera untuk kita semua

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkenankan kami atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007.

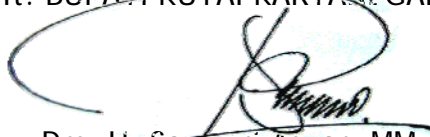
Penyampaian ILPPD merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan pemerintah daerah, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Di dalam Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat berbagai implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan antara proses perencanaan pemerintahan daerah, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah yang merupakan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan menetapkan konsepsi pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen pembangunan untuk mencapai kemandirian daerah yang kita kenal dengan nama GERBANG DAYAKU. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan maupun persoalan yang masih ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Besar harapan kami semoga dengan adanya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ini, akan dapat memberikan informasi yang lebih obyektif terhadap seluruh upaya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan visi dan misi Gerbang Dayaku yang telah divitalisasi dan diaktualisasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Drs. H. Samsuri Aspar, MM

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyampaian ILPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007 merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif amanah dan substansi pemerintahan tersebut, penyampaian *progress* kinerja pemerintahan kepada masyarakat, sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini merupakan konsekwensi atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam APBD Tahun 2007. Dengan demikian, penyampaian ILPPD ini merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah, yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2007. Kiranya hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang.

Dalam kerangka memelihara kemitraan untuk pengelolaan pemerintahan daerah, sejak awal kami telah berusaha seoptimal mungkin melakukan *interpretasi* atas beragam aspirasi kebutuhan masyarakat, yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik untuk kurun 5 (lima) tahunan maupun rencana kerja tahunannya. Dengan demikian, pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2007, tidak akan terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2010, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2007.

Fokus dari semua dokumen perencanaan tersebut, pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja untuk mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan yang tertuang dalam Gerbang Dayaku tahap II, Visi Kutai Kartanegara, yakni, "Menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas Keadilan, Kesetaraan, Keragaman dan Demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang Berkualitas, Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Dalam upaya memperkokoh pencapaian visi Kutai Kartanegara dimaksud, pemerintah daerah terus mengupayakan beragam alternatif kebijakan operasionalnya, yang disusun dalam kerangka rencana pembangunan pembangunan lima tahunan, yakni "Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat guna mendukung pencapaian visi Kutai Kartanegara 2010". Dengan memadukan 3 (tiga) misi, yakni:

1. Pemberdayaan pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum.
2. Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

Seiring dengan itu, maka berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan memprioritaskan tiga bidang pengembangan, yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)
2. Pengembangan Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*)
3. Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata (*Tourism*)

Ketiga bidang ini akan menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masa depan yang terus digali, dikembangkan dan ditingkatkan.

Pencapaian visi dan misi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diukur dari berbagai indikator kinerja seperti Indek Pembangunan Manusia. Dalam penghitungan IPM terdapat tiga faktor penilaian yang sangat penting yaitu *tingkat kesejahteraan masyarakat, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan*. Berikut disampaikan gambaran kinerja indikator makro pembangunan maupun indikator sosial ekonomi Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2007 antara lain :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia di Kutai Kartanegara yang telah disepakati dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2005 - 2010. IPM Kutai Kartanegara pada tahun 2007 adalah sebesar 72,9 bila dibandingkan dengan target IPM dalam RPJM-D Kutai Kartanegara tahun 2010 adalah sebesar 73,2 maka sampai dengan tahun 2007 masih terdapat gap sebesar 0,3 poin. Memperhatikan perkembangan IPM Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun, maka perkembangan rata-rata capaian IPM tahunannya adalah sebesar 1,6 poin. Oleh Karena itu, dalam waktu 3 (tiga) tahun yang tersisa sampai dengan tahun 2010, Kutai Kartanegara harus meningkatkan rata-rata capaian per tahun menjadi sebesar 1 point.

Indeks Pendidikan (IP), yang dipengaruhi oleh *Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*. AMH di Kutai Kartanegara telah mencapai angka sebesar 97,6 persen pada Tahun 2007 atau terdapat kenaikan sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan AMH tahun 2006. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat 2,4 persen penduduk Kutai Kartanegara yang belum bisa membaca dan menulis. Penduduk Kutai Kartanegara yang masih buta aksara sebagian besar yaitu penduduk usia lanjut dan penduduk yang secara geografis sulit menjangkau sarana dan prasarana pendidikan. Berkaitan dengan RLS Tahun 2007 sebesar 9,2 tahun, menunjukkan rata-rata penduduk Kutai Kartanegara baru mencapai tingkat pendidikan SMP.

RLS Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Indeks Kesehatan (IK), sebagai salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM yang mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Dari sisi Angka Harapan Hidup (AHH)

menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Kutai Kartanegara adalah 67,83. Angka Harapan Hidup tersebut masih di bawah proyeksi nasional yaitu 68,23 dan mengacu pada angka harapan hidup maksimal standar UNDP adalah sebesar 85 tahun.

Indeks daya beli masyarakat, Kutai Kartanegara pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.635.700,- atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006 dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp. 622.600. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan daya beli penduduk antara lain karena cukup tingginya perkembangan harga kebutuhan rumah tangga. Selain dari pada itu, penumpukan tenaga kerja pada level buruh/operator berpendapatan rendah yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan pekerja, juga merupakan kendala dalam meningkatkan daya saing konsumsi riil penduduknya.

Proporsi penduduk miskin. Pada tahun 2006 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Kutai Kartanegara sebesar 12,84 persen dan pada tahun 2007 menjadi 11,23 persen.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun relatif terus meningkat. Pada periode 2005-2007, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2006 mencapai 2,12 persen meningkat menjadi 2,73 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif cukup baik. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian administrasi kependudukan. Namun demikian, masih tingginya laju pertumbuhan penduduk adanya migrasi masuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM.

Selanjutnya, pembangunan *Ekonomi Makro* di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengandalkan pada eksploitasi Sumberdaya Alam. Hal ini tergambar dari total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2007 yang mencapai Rp. 70,769 Triliun, peranan sektor Pertambangan dan Penggalian sampai saat ini masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara yakni sebesar 85,99 persen sedangkan sektor Pertanian menyumbang sebesar 5,38 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing menyumbang 3,04 persen dan 2,53 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2007.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut di atas, Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih sangat tergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan hal ini disadari makin lama akan berkurang, menipis dan habis. Oleh karenanya, perlu dilakukan transformasi ketergantungan terhadap sumber daya alam secara bertahap dari eksploitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, kepada pengembangan sumberdaya yang dapat diperbaharui, ditingkatkan dan dikembangkan di masa mendatang.

PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

Untuk mewujudkan visi Menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas Keadilan, Kesetaraan, Keragaman dan Demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang Berkualitas, Maju, Mandiri dan Sejahtera, kegiatan difokuskan pada penyediaan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada *good governance* dengan kebijakan yang berorientasi pada Peningkatan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*), Pengembangan Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*) serta Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata (*Tourism*).

Berikut ini disampaikan hasil-hasil pembangunan secara garis besar pada masing-masing urusan antara lain :

I. URUSAN WAJIB

i. BIDANG PENDIDIKAN

Sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan yang semakin meningkat untuk setiap tahunnya. Peningkatan alokasi dana untuk peningkatan pendidikan ini sudah seharusnya diikuti pula dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang signifikan dengan besaran alokasi dananya.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas, baik untuk pelaksanaan maupun pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun anggaran 2007 telah dialokasikan dana untuk pelaksanaan program-program yang terinci ke dalam 184 kegiatan tersebut sebesar Rp. 245,711 Milyar dengan penyerapan dana sebesar Rp. 207,289 Milyar untuk pencapaian pelaksanaan fisik sebesar 84 persen.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana belajar mengajar dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan strategi meningkatkan pembangunan teritorial khususnya di bidang pendidikan, maka dari alokasi dana sebesar Rp. 238,195 Milyar untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang dirinci kedalam 113 kegiatan, dapat direalisasikan sebesar Rp. 196,541 Milyar atau dengan capaian kinerja pelaksanaan fisik sebesar 83 persen.

ii. BIDANG KESEHATAN;

Untuk meningkatkan mutu serta jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan antara lain :

- a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 830 juta dapat direalisasikan sebesar 96 persen dengan keluaran berupa Pengadaan peralatan penunjang Kegiatan Rumah Sakit antara lain 1 Unit Tower + 1 Reviter, 10 Unit HT, 4 Unit Radio, 1 bh LCD Proyektor, Peralatan Bengkel Bermesin/Non Mesin, pengadaan jaringan Oxygen Sentral dan Pembangunan Mess Rumah Sakit.
- b. Program Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan kesehatan perorangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 39,222 Miliar yang dipergunakan untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- c. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS sebesar Rp. 10,5 Milyar dipergunakan untuk Pengadaan Alat-alat kedokteran/medis.

iii. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang telah menyerap dana sebesar Rp. 1,162 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 1,321 Milyar diperoleh hasil antara lain Peningkatan Peringkat Kota dalam penilaian Kota sehat/Adipura, diperoleh data sebanyak 22 Perusahaan Batubara Pengelolaan Lingkungan Lahan yang sesuai RKL, 53 Perusahaan melaksanakan kebijakan bidang Lingkungan Hidup, 7 buku dan CD Pengkajian dampak lingkungan, Peningkatan peringkat kinerja 21 Perusahaan yg ikut Proper dan Sosialisai Proper, Data Kualitas Air Sungai Tenggarong & DAS Mahakam, Buku Kajian Kelayakan Implementasi Agroporestri pada Lahan Pasca Tambang & 5 jenis alat laboratorium, Dari hasil Koordinasi penyusunan Amdal diperoleh 7 Kelayakan Lingkungan serta Pemberian izin pembuangan air limbah dan rekomendasi tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3.
- b. Keberhasilan Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam diperoleh melalui kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dlm perlindungan & konservasi SDA yang menyerap dana sebesar Rp. 158,114 juta dari alokasi sebesar Rp. 161,690 juta.
- c. Dari Program Perlindungan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dihasilkan Buku SLHD untuk 18 Kecamatan dan 4 Sekolah dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 455,091 juta dari anggaran senilai Rp. 524,076 juta.

- d. Sementara itu keberhasilan Program Peningkatan Pengendali Polusi dilakukan melalui Pengujian Emisi dan Polusi Udara akibat aktivitas industri yang menyerap dana sebesar Rp. 116,872 juta dari alokasi sebesar Rp. 118,064 juta.
- e. Untuk Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut telah dihasilkan 300.000 bibit magrove untuk penanaman magrove Delta Mahakam yang menyerap dana sebesar Rp. 542,447 juta dari alokasi dana sebesar Rp. 717,380 juta.

iv. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Dalam pencapaian program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2007 adalah :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan dihasilkan melalui Pembangunan Jalan dengan penyerapan dana telah mencapai 74 persen dan Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan penyerapan dana telah mencapai rata-rata 80 persen
- b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
- c. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan penyerapan dana 70 persen
- d. Pelaksanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan penyerapan dana yang mencapai 60 persen dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan terdiri yang menyerap dana sebesar 80persen
- e. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan penyerapan dana 75 persen
- f. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan tingkat penyerapan dana 50 persen
- g. Pengendalian Banjir mampu menyerap dana sebesar 40 persen
- h. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan tingkat penyerapan dana baru 30 persen
- i. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan hanya mampu menyerap dana sebesar 55 persen
- j. Program Penunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun hanya mampu menyerap dana sebesar 51 persen.
- k. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang Program Pendidikan Menengah penyerapan dananya mencapai 51 persen
- l. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringanya dengan tingkat penyerapan dana mencapai 51 persen
- m. Pembangunan Rumah Sakit Umum Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara.
- n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dilaksanakan melalui Pembangunan sarana dan prasarana pendukung PON VII dan olah raga lainnya.

- o. Pelaksanaan Program Pembangunan Perdesaan melalui Peningkatan sarana dan prasarana desa/kelurahan di 18 Kecamatan melalui Program Gerbang Dayaku Perdesaan
- v. **BIDANG PENATAAN RUANG;**
Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan Tata Ruang, maka dari alokasi dana sebesar Rp. 2,165 Milyar yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penataan ruang dengan hasil antara lain Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan (Wilayah Pesisir) Tahap I, Penyusunan Draft Perda RTRW Kab Kutai Kartanegara dan Sosialisai Perda Tata Ruang Kutai Kartanegara.
- vi. **BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN;**
 - a. Untuk Program Pengembangan data/informasi dari alokasi dana sebesar Rp. 21,9 Milyar telah terserap dana sebesar Rp. 19,9 Milyar dengan hasil antara lain dengan tersusunnya sistem informasi, tersedianya data pembangunan, tersusunnya peta dasar, buku-buku perencanaan dan pengendalian, terlaksananya study kelayakan dan analisa-analisa di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyerap dana sebesar Rp. 5,5 Milyar yang menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJP, KUA, PPAS, pelaksanaan Musrenbang, mulai tingkat kecamatan sampai tingkat Nasional dan sosialisasi perencanaan pembangunan serta pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dengan menyusun Buku Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pedesaan
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi telah menyerap dana sebesar Rp. 6,8 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 7,4 Milyar yang menghasilkan Master Plan Rencana Pembangunan Ekonomi, Buku Analisis Perencanaan Ekonomi, Model Pengelolaan & Pengembangan Kawasan Industri Kecil Dan Menengah, Detail Desain Engineering dan FS bidang kelistrikan dan kawasan industri serta Buku dan Peta Desain Pemanfaatan Lahan Bekas Penambangan Batu Bara Kab Kukar TA 2007
 - d. Program Perencanaan Sosial Budaya dari alokasi dana sebesar Rp. 2,5 Milyar telah terserap sebesar Rp. 2,3 Milyar yang menghasilkan Masterplan Bidang Pendidikan dan kesehatan, Sistem Informasi Pelayanan Publik serta Studi Assesment Kelembagaan dan Komonitas di Kukar Tahun 2007
 - e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam telah menyerap dana sebesar Rp. 1,38 Milyar dengan realisasi fisik mencapai 100persen yang dipergunakan untuk membiayai Penyusunan Masterplan Prioritas Penanganan Perencanaan Pengamanan & Perlindungan Daerah Pantai Terhadap Erosi, Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Rencana pengembangan Jaringan Transportasi dan Penyusunan Buku Perencanaan

Aksesibilitas Perdesaan terintegrasi (IRAP) Kabupaten Kutai Kartanegara

- f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah telah menyerap dana sebesar Rp. 5 Milyar untuk pelaksanaan kegiatan berbagai Monitoring, Evaluasi, verifikasi, asistensi, sosialisasi dan Pelaporan program pembangunan, peningkatan kapasitas perencanaan, analisis model pemberdayaan masyarakat.

vii. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- a. Alokasi dana sebesar Rp. 503 juta dipergunakan untuk pembiayaan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Tercapainya Kelompok Belajar Paket A dan B dilakukan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kelompok Belajar Paket B setara SMU yang menyerap dana sebesar Rp. 700 juta.
- c. Untuk pelatihan Tutor, Rapat Koordinasi, Pemberantasan Buta Huruf, Pemberdayaan Tenaga Pendidik, Pengembangan Data dan Informasi serta Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal dilakukan dengan menyerap dana sebesar Rp. 2,400 Milyar dari alokasi dana sebesar Rp. 2,593 Milyar yang diperuntukkan membiayai kegiatan.
- d. Untuk Penunjang kegiatan Taman baca masyarakat (TBM) Jam Bentong dan (TBM) 3 SKB dilakukan dengan menyerap dana sebesar Rp. 152,458 juta dari alokasi sebesar Rp. 155,174 juta untuk
- e. Untuk Penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda (PPBN), Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) serta Seleksi dan Diklat Paskibaraka dicapai setelah menyerap dana sebesar Rp. 561,913 dari alokasi sebesar Rp. 578,200 yang dipergunakan
- f. Terciptanya Tenaga - tenaga Skill siap pakai di bidang pertukangan, perbengkelan, salon kecantikan dan juga kerajinan dilakukan setelah menyerap dana sebesar Rp. 1,520 Milyar dari anggaran sebesar Rp. 1,615 Milyar.
- g. Dengan menelan dana sebesar Rp. 20,142 Milyar dari alokasi dana sebesar Rp. 22,082 Milyar yang dipergunakan untuk kegiatan keolah ragaan seperti Seleksi dan Lomba berbagai Cabang Olahraga, Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah, penyelenggaraan kompetisi olah raga.
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga menyediakan dana sebesar Rp. 2,688 Milyar yang diarahkan untuk menciptakan tempat olahraga yang nyaman untuk meningkatkan Prestasi. Dengan menyerap dana sebesar Rp. 1,870 Milyar dipergunakan untuk pembebasan lahan, serta pengadaan alat dan pembangunan sarana dan prasarana olah raga untuk PON.

viii. BIDANG PENANAMAN MODAL

- a. Dari nilai anggaran sebesar Rp. 350 juta, telah dimanfaatkan untuk penyusunan rancangan Perda, kaitannya dengan tindak lanjut MoU antara Pemda Kukar dengan Perusahaan Air bersih Belanda sebesar Rp. 328,738 juta
- b. Dari alokasi dana sebesar Rp. 200 juta digunakan untuk Pembuatan 50 buku Data Base Perekonomian.
- c. Dengan anggaran sebesar Rp. 5,256 Milyar telah dimanfaatkan sebesar Rp. 5,179 Milyar dengan hasil antara lain untuk mengikuti Pameran Agro and Food Agribisnis, Pembuatan Buku Profil Investasi, mengikuti Pameran Promosi Dalam Negeri Sebanyak 4 (empat) Kali, mengikuti Pameran Promosi di Malaysia dan Vietnam, untuk Penilaian Lapangan Atas PMDN / PMA dan Pendataan Perizinan, terlaksananya Workshop on Dispute Settlement Mechanism on Investment di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menjalin Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan UNCTAD PBB Dalam Rangka International Gateway dan Pertemuan Internasional.
- d. Dengan bermodalkan alokasi dana sebesar Rp. 1,9 Milyar, digunakan untuk melakukan persiapan pembuatan Sistem Pelayanan Satu Atap Di Bidang Investasi yang disesuaikan dengan PP No. 41 Tahun 2006, Monitoring dan Pendataan Izin Kerja Tenaga Asing di 9 kecamatan, Pengadaan Sarana Penunjang Kerja, Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan KLPM, tersedianya informasi tentang berbagai kebijakan dan peluang penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, pembuatan CD Interaktif Investasi.
- e. Data Kajian Prospektif Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Lahan Potensi Investasi serta tersedianya Rumusan Kebijakan Dalam Pelayanan Investasi dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 295 juta dari alokasi sebesar Rp. 300 juta yang menghasilkan

ix. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- a. Untuk menciptakan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, diperlukan dana sebesar Rp. 95 juta, yang telah dicapai dengan meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengembalian Kredit Usaha Kecil Pedesaan.
- b. Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dapat dicapai dengan menyerap dana sebesar Rp. 39 juta dari anggaran sebesar Rp. 46,5 juta.
- c. Upaya Peningkatan Kualitas SDM Pengurus Lembaga Perkreditan Desa telah menyerap anggaran sebesar Rp. 296 juta dari rencana semula yang sebesar Rp. 300 juta

- x. **BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;**
Melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9,067 Milyar untuk bidang Kependudukan dan catatan Sipil telah terealisasi untuk pelaksanaan kegiatan fisik sebesar 100 persen yang menyerap dana Rp. 9,026 Milyar dengan keluaran berupa Sosialisasi, Penyediaan informasi, Peningkatan Pelayanan Publik Tentang Pembuatan Akta Catatan Sipil, Peningkatan Aparat, Mekanisme, Metode Kerja, pelayanan publik dan Kelembagaan Kependudukan, Pengawasan Warga Negara Asing didalan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pengembangan database kependudukan, Implementasi System Administrasi Kependudukan, Pembangun dan Pengoperasian SIAK secara terpadu serta penataan arsip kependudukan.
- xi. **BIDANG KETENAGAKERJAAN;**
Untuk bidang urusan ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kerja sebagai berikut :
- a. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang dipergunakan untuk Pembinaan dan pelatihan Lembaga Latihan Swasta telah mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 100 juta.
 - b. Program Peningkatan kesempatan kerja dengan alokasi dana sebesar Rp. 1,050 Milyar telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja, Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui sosialisasi jabatan tenaga kerja, Pelatihan/penerapan pengembangan teknologi tepat guna (perluasan kesempatan kerja) dan Pembinaan dan penempatan tenaga kerja (pembinaan usaha pemberian kerja)
 - c. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 2,393 Milyar dipergunakan untuk membiayai Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan (pembinaan & penyuluhan syarat-syarat kerja), Pembinaan organisasi ketenagakerjaan (LKS Tripartit & Dewan Pengupahan Daerah), Pendukung Zona Bebas Pekerja Anak, Penarikan Pekerja Anak, Pembinaan dan pengawasan keselamatan & kesehatan kerja
- xii. **BIDANG KETAHANAN PANGAN**
- a. Melalui Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang menyerap dana sebesar Rp. 150 juta telah disusun kebijakan disektor pertanian setelah dilakukan Monitoring Harga Gabah, Palawija serta Pengembangan Peternakan dan Perkebunan dan tersedianya data keadaan stok pangan.

- b. Dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 3,209 Milyar, Program Pengembangan Kecamatan dicapai dengan hasil berupa tercapainya pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya stabilitas harga melalui Penyediaan Beras untuk Keluarga Miskin.
- c. Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang menyerap dana sebesar Rp. 457 juta dari alokasi sebesar Rp. 580 juta memperoleh hasil antara lain tercapainya program Desa Mapan sesuai Jadwal (4 thn desa binaan sudah mandiri), terlaksananya sosialisasi mutu Agribisnis dan pengurangan ketergantungan terhadap makanan pokok (beras) bagi masyarakat.

xiii. **BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Dengan menyerap dana sebesar Rp. 462 juta dari alokasi sebesar Rp. 490 juta, telah menghasilkan peningkatan keterampilan dan kemampuan anggota kelompok dalam mendidik anak, Posyandu kembali berjalan secara terpadu serta tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang terjadi pada Ibu Hamil, terbentuknya KPAID Kab Kukar dan pelaksanaan Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Kesenjangan Serta Keadilan Gender.
- b. Dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 335 juta dari alokasi dana sebesar Rp. 340 juta, telah berhasil meningkatkan pengetahuan perempuan dan anak tentang NAPZA dan menurunkan kasus KDRT yg dialami perempuan anak & keluarga serta peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai KDRT

xiv. **BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA;**

Dalam rangka melanjutkan Program Keluarga Berencana, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menelan biaya Rp. 1,159 Milyar dengan sasaran untuk Pembinaan Program KB Lapangan, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin, Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB dan Pengembangan Model Operasional BLB, Posyandu dan Padu Harganas Tingkat Nasional

xv. **BIDANG PERHUBUNGAN;**

- a. Program Perencanaan Transportasi lokal terpadu dengan alokasi dana sebesar Rp. 1 Milyar dipergunakan untuk Penyusunan Tatralok
- b. Program Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dari alokasi dana sebesar Rp. 2,472 Milyar baru dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,130 Milyar dengan keluaran berupa Feasibility Study, Amdal, Master Plan & Detail Design Engineering Pelabuhan Peti

- Kemas Di Pendingin Kec. Sanga-Sanga, Tertibnya penggunaan Frekwensi Radio di Kukar dan tersusunnya Data Transportasi dan Pos-Tel.
- c. Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dari alokasi dana sebesar Rp. 23,739 Milyar baru dapat direalisasikan sebesar Rp. 10,567 Milyar dengan keluaran berupa Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas, rehabilitasi dan pembangunan terminal, rehabilitasi dermaga.
- xvi. **BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;**
 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dari alokasi sebesar Rp. 23,783 Milyar dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 18,708 Milyar untuk menghasilkan Pemanfaatan Sistem E-Government, pembangunan infrastruktur E-Government, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi di tingkat sekolah, Pengadaan alat studio dan komunikasi, e-Procurement, tersambungnya 10.000 SST, 1 (satu) Gedung MSC (Mobile Switching Controller) dan Implementasi Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMPTAP). Sementara untuk pelayanan protokoler telah menyerap anggaran sebesar Rp. 1,7 Milyar.
- xvii. **BIDANG PERTANAHAN;**
- a. Program pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah dari alokasi dana sebesar Rp. 300 juta telah dimanfaatkan untuk penyusunan sistem pendaftaran tanah dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 152 juta.
 - g. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah dari alokasi dana sebesar Rp. 1,9 Milyar telah terserap sebesar Rp. 751 juta dengan hasil berupa proda (prona) dinas pertanahan, sertifikat tanah milik Pemda dan masyarakat, redistribusi tanah Kabupaten Kutai Kartanegara 100 persil dan tersedianya data inventaris tanah milik Pemda dan administrasi kepemilikan tanah
 - h. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan telah menyerap dana sebesar Rp 711 juta untuk Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan dari nilai anggaran Rp. 1,1 Milyar.
 - i. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan dengan alokasi dana sebesar Rp. 300 juta yang digunakan untuk Fasilitas Pengadaan Pengukuran Pertanahan telah menyerap dana sebesar Rp. 246 juta.
- xviii. **BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI;**
- a. Program Hubungan antar Lembaga dengan anggaran Rp. 2,637 Milyar dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,375 Milyar dengan keluaran antara lain berupa data base parpol, data hasil Monitoring, Eavaluasi dan pelaporan, selesainya perselisihan parpol, adanya Forum Diskusi Politik, Desk Pilkada, terlaksananya

- Sosialisasi dan fasilitasi ormas, Sosialisasi pemilih pemula dan data usia pemilih pemula.
- b. Program Wawasan kebangsaan telah menyerap dana sebesar Rp. 496,568 juta dari alokasi sebesar Rp. 498,168 juta yang dimanfaatkan untuk Riset/survey dan monitoring Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT), Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, Peningkatan pengawasan terhadap exs. tahanan napi G 30 S / PKI serta Sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan
 - c. Untuk Pengendalian Masa telah menyerap anggaran sebesar Rp. 1,305 dari alokasi sebesar Rp. 1,317 Milyar dengan hasil berupa Pengerahan dan kesiapan anggota Hansip/Linmas, terlaksananya pendataan, koordinasi dan bimbingan anggota Hansip/Linmas, tersedianya sarana dan prasarana SATLAK PB Bencana dan terlaksananya sosialisasi UU No 24 Tahun 2007 dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana.
- xix. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;

Realisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditempuh dalam rangka meningkatkan mutu, disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga dan aparatur dalam menjalankan pemerintahan telah menyerap anggaran sebesar Rp. 27,698 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 35,497 Milyar yang menghasilkan terlaksananya Pendidikan penjurusan struktural, Diklat prajabatan bagi CPNS Daerah, Diklat struktural bagi PNS Daerah, pembinaan karir PNS, seleksi dan penempatan CPNS, penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, penghargaan bagi PNS berprestasi, bantuan tugas belajar, penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional kepemimpinan.

Untuk melaksanakan program pengawasan pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bawaskab Kutai Kartanegara telah menyerap dana sebesar Rp. 3,777 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 7,774 Milyar yang dipergunakan dalam rangka Pengawasan Administrasi Kelurahan dan Desa, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kota dan Desa, Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bawaskab Kutai Kartanegara, Pengawasan Inventarisasi Aset/Kekayaan Daerah, Inventarisasi Kegagalan Pembangunan Gerbang Dayaku (Buku Merah) dan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Selain itu dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan yang akuntabel serta untuk konsolidasi lembaga dan aparatur guna menjamin

kelangsungan pemerintahan yang baik, maka pada tahun anggaran 2007 melalui program Penelitian umum telah dapat menyelesaikan seluruh kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 6,668 Milyar yang menghasilkan berbagai hasil analisis, studi, penelitian dan pengkajian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang pemerintahan Umum dan penegakan peraturan perundangan secara tegas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahun 2007 antara lain :

- a. Program Penataan Daerah Otonomi Baru yang menyerap dana sebesar Rp. 824 juta dari alokasi sebesar Rp. 1,275 Milyar menghasilkan tersusunnya Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, pelaksanaan pelatihan sebanyak 2 angkatan di Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Samboja dengan peserta masing-masing sebanyak 40 orang dan 37 orang dan Terlaksananya rapat kerja yang diikuti oleh seluruh Camat dan Sekretaris Kecamatan sebanyak 36 orang, serta sub kegiatan orientasi lapangan bagi Camat sebanyak 18 orang ke 2 lokasi di luar daerah.
- b. Keberhasilan pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ditandai dengan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Yang Berhubungan Dengan Kewenangan Bupati yang Diserahkan Kepada Camat yang diikuti oleh peserta sebanyak 36 orang, Legislasi Daerah berupa penyusunan Produk Hukum Daerah, Kontribusi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa penyuluhan, diskusi dan temu wicara serta pemuatan berita ke media massa, juga terlaksananya Koordinasi pembinaan dan bantuan hukum.

Sedangkan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat khusus, serta dalam rangka evaluasi pelaksanaan otonomi daerah maka melalui Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyerap dana sebesar Rp. 3,109 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 4,838 Milyar dengan melaksanakan program sbb :

- a. Pelaksanaan Harkitnas, HANI, Haornas, Hapsak, Sumpah Pemuda, Pahlawan dan AIDS, Kegiatan Hari-Hari Besar Islam serta Hari-Hari Besar Pemberdayaan Perempuan.
- b. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani, Pelaksanaan Manasik HAJI dan Pelepasan Calon Jemaah Haji
- c. Tersusunnya Buku Kuning (Perdesaan Kutai Kartanegara).

Untuk mencapai hasil berupa peningkatan Kualitas Pelayanan PDAM Terhadap Masyarakat, penyediaan Data Potensi dan Peluang Investasi

Air Bersih di Kecamatan, Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Sumberdaya sarana dan prasarana PDAM dan Peningkatan koordinasi dan Bimbingan Unit Usaha Perusahaan Daerah dari anggaran sebesar Rp. 484,964 juta telah berhasil menyerap dana sebesar Rp. 264,068

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan bermodalkan alokasi dana sebesar Rp. 403,5050 juta dengan hasil tersedianya data inventarisasi dan termonitornya Asset-Asset Pemkab Yang menghasilkan PAD.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksnaakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menyerap alokasi dana sebesar Rp. 16,513 Milyar dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 39,270 Milyar dipergunakan untuk membiaya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka kontroling dan menampung aspirasi masyarakat, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Penjaringan/Seleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi-komisi Sekretariat DPRD.

xx. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Dengan menyerap dana sebesar Rp. 30,891 juta telah berhasil mengirimkan 10 orang pasien sakit jiwa ke RS Jiwa dari target 12 orang pasien dengan anggaran Rp. 150 juta.
- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah menyerap dana sebesar Rp. 414,996 juta dari alokasi sebesar Rp. 600 juta untuk melakukan Pengelolaan Penerima Bantuan Penunjang Pendidikan dan Evaluasi dan Sosialisasi Bantuan Sosial

Melalui Program Penyiapan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah dapat mengatasi Masalah pesangon dan gaji Karyawan Resort Pulau Kumala yang di PHK dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 913,334 juta.

xxi. BIDANG SOSIAL;

Dalam Pencapaian Program dan kegiatan Pembangunan bidang urusan sosial yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 dengan memanfaatkan alokasi dana sebesar Rp. 8,524 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 10,416 Milyar diperoleh hasil pencapaian antara lain :

- a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) bagi 45 orang Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemberian Keterampilan dan Bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi 390 KK Fakir Miskin, Pemberian Keterampilan Bagi Penyandang masalah sosial bagi 40 KK, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi 80 orang Lanjut Usia, Pemberian Santunan Kepada 17.106 orang Warga Tidak Mampu (SWTM).

- b. Terlaksananya penyuluhan sosial dan Publikasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberian Bantuan Permakanan dan Rehab Ringan bagi 12 Panti Sosial Asuhan Anak, Pemberian Bantuan Sosial Bagi 181 KK Korban Bencana, Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi 55 KK eks Korban Kebakaran, Pelatihan Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana, Pemberian Bantuan Rumah bagi 26 Veteran dan Janda Veteran, Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dilakukannya Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 8 Kecamatan.
- c. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan serta Praktek Kerja bagi 80 orang anak terlantar , Bimbingan Mental dan Pemberian Keterampilan bagi 100 orang Penyandang Cacat dan pemberian Bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi 53 orang Penyandang Cacat.
- d. Pembangunan 1 Gedung Kantor dan 3 wisma Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara dan Rehab Ringan 3 wisma Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara.
- e. Pemberian Pelatihan dan Keterampilan serta pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif bagi 20 PSK, Bimbingan serta pelatihan Usaha Ekonomis produktif dan pemberian Bantuan Modal usaha bagi 30 orang eks narapidana.
- f. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap 12 panti, pembinaan dan Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial bagi 75 orang Petugas Sosial Masyarakat, Pembinaan Organisasi bagi 155 anggota Karang Taruna, Pembinaan 2 kelompok Karang Taruna dan Organisasi Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara serta Pemberian Santunan kepada 505 orang Veteran dan Janda Veteran di Kab. Kutai Kartanegara.

xxii. BIDANG KEBUDAYAAN

- a. Dari alokasi dana sebesar Rp. 162,800 juta dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pengembangan Seni Budaya sebesar Rp. 147,724 juta.
- b. Terbinanya 10 kelompok seni di 10 kecamatan di Kab. Kutai Kartanegara dan Meningkatnya SDM Pelatih Tari Jepen (25 orang) memanfaatkan dana sebesar Rp. 200 juta.
- c. Pencetakan buku pesona budaya dan alam Kutai Kartanegara (200 exp) dengan dana Rp. 59,4 juta dari rencana sebesar Rp. 65 juta

- d. Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dilakukan dengan alokasi dana sebesar Rp. 974 juta dari alokasi semula sebesar Rp. 975 juta dengan hasil sebagai berikut :
1. Ceramah di 3 Kecamatan (300 siswa), Pencetakan buku alih aksara naskah UU Kerajaan Kutai (750 exp)
 2. Terungkapnya aspek religius dan sosial budaya situs purbakala di Anggana dan Kota Bangun
 3. Terlaksananya Pemeliharaan situs di 7 kecamatan dan Pembuatan 4 buah plang nama situs

xxiii. BIDANG ARSIP;

- a. Alokasi dana sebesar Rp. 102,260 juta untuk Program perbaikan sistem administrasi kearsipan telah dimanfaatkan untuk melakukan Monitoring dan pembinaan kearsipan
- b. Dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 289,758 juta, pelaksanaan Program peningkatan pelayanan informasi digunakan untuk Pembuatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) serta Kursus, pelatihan, lokakarya, workshop dan seminar kearsipan Tk Nasional dan Daerah

II. URUSAN PILIHAN

i. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN;

Dari alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana perikanan, pembinaan dan pengembangan data perencanaan, pendampingan DAK bidang perikanan dan pmutakhiran data statistik perikanan sebesar Rp. 525,023 juta dapat direalisasikan sebesar Rp. 487,481 juta.

Dalam rangka pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2007 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 8,947 Milyar telah terealisasi sebesar Rp. 7,040 Milyar untuk membiayai 35 kegiatan bidang perikanan.

Dari alokasi dana sebesar Rp. 3,770 untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan kaitannya dengan usaha pembangunan teritorial telah terserap dana sebesar Rp. 2,105 Miliar dengan hasil berupa teknologi dan sarana prasarana perikanan seperti keramba, tempat pelelangan ikan, cold box, tempat pengeringan ikan, teknologi pembudidayaan ikan betutu dll.

ii. BIDANG PERTANIAN;

Dengan penyerapan dana sebesar Rp. 1,294 Milyar dimanfaatkan untuk program Peningkatan Pengetahuan, SDM dan Pengembangan kelembagaan, Pemuthakiran Data Base Pertanian dan Mobilisasi pertanian dan Dana Pendamping TP dan Kegiatan Aparatur Dinas dari alokasi sebesar Rp. 2,286 Milyar.

Untuk mencapai tujuan transformasi ketergantungan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kedalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, maka melalui program-program di bidang pertanian untuk memacu pertumbuhan ekonomi telah dianggarkan sebesar Rp. 7,473 Milyar yang penyerapannya hanya sebesar 4,220 Milyar.

Sementara itu untuk program peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan optimalisasi wilayah menuju swasembada daging diperoleh melalui Peningkatan Produksi Peternakan dengan besaran dana Rp. 19,869 Milyar dengan capaian akhir nilai indikator kebijaksanaan/ program sebesar 69,45 (cukup berhasil), diperoleh Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Ternak Berbasis Agribisnis.

Dalam bidang perkebunan, dengan memanfaatkan dana sebesar Rp. 9,511 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 13,299 Milyar dimanfaatkan untuk pengadaan bibit jarak, lada dan kelapa sawit serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengembangan Perkebunan.

Untuk menunjang program Gerbang Dayaku pedesaan di bidang pertanian, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 8,938 Milyar yang telah dimanfaatkan untuk pengadaan pupuk, benih padi dan palawija, alat-alat pertanian dan pengembangan usaha tani sebesar Rp. 7,025 Miliar.

Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan besaran dana Rp. 3.309 Milyar diarahkan untuk membina sumber daya pelaku peternakan, pengamatan dan penyidikan hama penyakit, pemberantasan dan pengendalian penyakit dan pengawasan kesehatan ternak.

iii. BIDANG KEHUTANAN

Dalam rangka rehabilitasi lahan, pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan pemantapan perlindungan hutan dan penyuluhan kehutanan dari alokasi sebesar Rp. 42,440 Miliar hanya mampu direalisasikan sebesar Rp. 8,721 Miliar.

iv. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam bidang energi dan sumber daya mineral dengan anggaran sebesar Rp. 3,628 Milyar diarahkan pada Inventarisasi keperluan dan penggunaan energi listrik dalam wilayah Kab Kukar, Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya mineral dan energi, Pemasangan Listrik Desa Antai Kec. Sebulu, Pengembangan listrik pedesaan, Penyusunan program, evaluasi

kinerja dan pemuta akhiran manajemen informasi bidang pertambangan dan energi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan yang dipergunakan untuk Tim Penanggulangan Illegal Mining telah dianggarkan sebesar Rp. 500 juta.

v. **BIDANG PARIWISATA;**

Dari Program Pengembangan Pemasaran Wisata telah diserap dana sebesar Rp. 2,903 Milyar dari alokasi sebesar Rp. 2,905 Milyar yang telah menghasilkan Rekaman CD dan VCD Lagu Tradisional Kutai, Buku Petunjuk wisata, CD Interaktif dan layar sentuh (LCD), Buku Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Kab. Kutai Kartanegara, Film Dokumenter Potensi Alam dan Budaya Kab. Kutai Kartanegara (lanjutan) dan terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan dan Peraturan lain dibidang Kepariwisata / atraksi wisata serta Perencanaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam usaha untuk pencapaian prioritas pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata adalah melalui alokasi dana sebesar Rp. 2,353 Milyar yang telah diserap sebesar Rp. 1,194 Milyar dengan hasil antara lain keikutsertaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pameran promosi pariwisata di dalam maupun luar negeri, hasil inventarisasi industri pariwisata, terlaksananya event wisata secara berkala, tersedianya peta obyek dan potensi wisata serta pembinaan potensi aneka wisata.

Untuk penataan obyek-obyek wisata, peningkatan kawasan wisata dan pembinaan SDM bidang usaha rekreasi dan hiburan umum yang ada di Kutai Kartanegara, maka dari alokasi sebesar Rp. 3,911 Milyar telah dimanfaatkan sebesar Rp. 3,466 Miliar.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sementara itu penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen Teknis kepada Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai Dana Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berisikan tentang Penjelasan Umum Dana Tugas Pembantuan, Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang

diselenggarakan secara sinergis dengan pelaksanaan asas desentralisasi. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan selama ini adalah kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.

Dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2007 melalui dana APBN yang sebesar Rp. 20,073 Miliar hanya terserap sebesar Rp. 7,580 Miliar. Sementara dana tugas pembantuan yang bersumber dana dari APBD Propinsi sebesar Rp. 114,251 Miliar mampu terserap sebesar Rp. 73,959 Milyar.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, sebagaimana pasal 195 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 disebutkan "bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan".

Amanat tersebut merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada didaerahnya melalui kerjasama antar daerah maupun melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Pada tahun anggaran 2007, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan kerjasama antar daerah secara spesifik, akan tetapi hanya berupa berbagi pengalaman dengan daerah lain yang melakukan kunjungan kerja maupun studi banding ke Kabupaten Kutai Kartanegara maupun sebaliknya.

Forum koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Kartanegara dengan instansi vertikal di daerah pada tahun 2007 berupa penyelenggaraan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini diagendakan secara rutin setiap bulan sebanyak dua kali pertemuan.

Materi rapat atau pertemuan dalam rangka koordinasi antara lain menyangkut bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang keamanan dan ketertiban umum, bidang pembangunan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang lingkungan hidup, penanganan bencana, rencana penyelenggaraan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 2008 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penentuan batas wilayah merupakan hal yang cukup sensitif sehingga apabila tidak dilakukan secara hati-hati akan dapat menimbulkan konflik di lapangan. Oleh karena itu dalam hal penegasan batas wilayah, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara untuk pelacakan trayek batas daerah telah dilakukan Trayek Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kota Bontang dan Kabupaten Malinau, Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Disamping penegasan Batas Wilayah dan Pelacakan Trayek Batas Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, juga telah dilakukan penataan dan pelacakan batas wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara umum bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2007 tergolong bencana dengan skala kecil, hanya beberapa yang cukup besar dan menimbulkan cukup banyak kerugian. Diantara bencana yang terjadi antara lain bencana banjir, kebakaran dan kecelakaan.

Dalam rangka mengatasi serta menanggulangi bencana yang terjadi pada tahun 2007, beberapa sumber serta besaran dana yang tersalurkan melalui Pemkab, meliputi :

- Bakornas PB : Rp. 100.000.000,-
- APBD Kabupaten: Rp. 1.221.373.700,-
- Bansos APBD Kabupaten : Rp. 150.000.000,-
- Partisipasi Perusahaan/ Masyarakat : Rp. 131.700.000,-
- Satkorlak PB Propinsi Kaltim berupa 100 ton beras

Beberapa potensi bencana yang diperkirakan dapat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain Banjir, Kebakaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Air

Di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2007 terdeteksi indikasi konflik dan kerawanan sosial. Namun secara umum, tidak terdapat gangguan atas ketenteraman dan ketertiban umum seperti konflik berbasis SARA, anarkisme ataupun separatisme yang memiliki dampak dengan skala yang cukup luas dan mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan serta sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lebih terfokus pada upaya penciptaan ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah seperti halnya penertiban IMB, KTP, PKL, MIRAS, Surat Ijin Usaha (SIU), HO, gelandangan dan pengemis (GEPENG), Pelajar, Tempat Hiburan Umum, Lokalisasi PSK, Reklame, serta Galian C dan Tambang

Liar. Disamping itu juga dilakukan penertiban terhadap PNS yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner.

Secara umum dalam setiap kejadian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait seperti Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri maupun perangkat daerah terkait dalam mengantisipasi dan menanggulangi serta mencari solusi atas kejadian-kejadian yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

PENUTUP

Berbagai keberhasilan dan kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, keseluruhannya tidak lepas dari perkenan dan hidayah Allah SWT, yang senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan daerah serta adanya kerja keras dan dukungan dari berbagai stake holder pembangunan, terutama dari kalangan DPRD dan masyarakat. Sebaliknya kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2007 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat maupun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat tetapi semata-mata hanya karena keterbatasan sumber daya terutama sumber dana, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati dan melalui informasi ini kami mohon semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang.